



Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00

bb

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penetapan Masa Manfantatas Harta Bakwanjud Bukan Bangunan dan Harta Tidak Berwujud

No. SK:

Persyaratan

- Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4740);
- Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nornor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
- 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nornor PER12/PJ / 2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur



Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00

bb

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

- 1. Layanan ini diberikan kepiatektoraja Jenjaleyah Pajakgajkhartap Pirmuhonan untuk dapat memperoleh penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Kelompok 3 (tiga) sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.
- 2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.
- 3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: Permohonan harus disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Pajak diperolehnya harta berwujud.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245